

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.⁷

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.⁸

Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

⁷ Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 188

⁸ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), 71.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.

Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan.⁹

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar

⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan (Jakarta : Kencana Prana Media Group, 2012) hlm. 121

paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralp Dahrendof, sebagaimana dipaparkan Prof Damsar¹⁰, sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang memebentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat

¹⁰ Damsar. *Pengantar teori sosiologi*. (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 165.

kebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupaun kesepakatan yang dibuat baru.

B. Teori AGIL Talcott Parson

AGIL singkatan dari *Adaptation, Goal, Integration, Latency* adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Sosial System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Paradigma AGIL adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil.

AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan Parsons diartikan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari suatu sistem. Keempat persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adaptasi (*Adaptation*).

Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat

sesuai dengan masyarakat. Adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.¹¹

Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh tentang urbanisasi, dimana keluarga dari desa yang pindah ke kota. Agar mereka tetap hidup dengan kerasnya kehidupan dikota mereka harus belajar kembali tentang bagaimana hidup dilingkungan yang baru, menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan tempat tinggal mereka dikota. Jika keluarga ini tidak mampu menyesuaikan diri maka mereka akan tereliminasi dari kota tersebut.

2. Tujuan (*Goal*).

Yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial.

Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kembali pada cita-cita sebuah keluarga dari desa yang pindah ke kota, mereka tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu mengapa

¹¹ Ritzer. *Teori sosiologi modern*, 185.

mereka pindah kekota. Setelah sampai di kota dan beradaptasi serta belajar dengan sistem kehidupan sosial di kota keluarga tersebut dengan cita-citanya dari desa mencoba menemukan cara untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka, setelah melihat fakta yang ada pada masyarakat kota.

Tentu saat di desa mereka tak pernah membayangkan bagaimana harus mewujudkan cita-cita mereka di kota. Maka penting untuk memiliki sebuah tujuan di dalam masyarakat atau keluarga sebagai motivasi untuk selalu maju mengapai tujuan. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka sistem didalam masyarakat atau keluarga akan mandek dan pasti mengalami stagnanisasi.

3. Integrasi (*Integration*).

Yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekutan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan.¹²

Hubungan antara adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas sebuah masyarakat atau keluarga sebagai bagian penyusun masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan itu dapat dijelaskan dari tingkah laku/tindakan para anggota masyarakat. Contoh dari sistem tindakan Parsons adalah Pancasila

¹² Ralf, Dahrendorf. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik*. (Jakarta: CV Rajawali, 1986) hlm. 26

yang ada di negara Indonesia akan mendorong segenap warga untuk melaksanakan semua yang ada di dalamnya, antara lain menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia, menjunjung hak-hak asasi manusia dengan keadilan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat akan mengadakan musyawarah apabila ada sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Menjaga kepentingan masyarakat lainnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalamnya.

4. *Latency*.

Pada akhirnya di dalam masyarakat itu harus ada Latensi atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (*pattern maintenance*). Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.

Dalam biologi yang diadaptasi oleh Parsons, sistem organisasi dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi, yaitu fungsi penyesuaian diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan kebutuhan individu. Kepribadian sebagai subsistem dalam sistem tindakan melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuannya.

Sistem sosial yang merupakan subsistem tindakan berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat tersebut. Sedangkan sistem budaya sebagai subsistem tindakan mempunyai kaitan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma dan nilai-nilai yang memotivasi individu dalam melakukan suatu tindakan.¹³

Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial. Sistem yang timpang, sebut saja karena tidak adanya kesadaran bahwa mereka merupakan sebuah kesatuan, menjadikan sistem tersebut tidak teratur. Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *Safety Valve* atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL.

Di samping itu, Parsons menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada persyaratan:

1. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain.
2. Sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain.
3. Sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional.
4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya.

¹³ H.A.R, Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 367.

5. Sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. Bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan.

6. Sistem harus memiliki bahasa Aktor dan Sistem Sosial.

Menurutnya persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses Sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya.

Masyarakat merupakan sebuah sistem. Nilai-nilai dan norma-norma tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Jika suatu masyarakat telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara fungsional masyarakat tersebut telah mampu menjaga nilai dan norma agar kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis. Konflik yang terjadi dalam suatu sistem masyarakat struktur fungsional yang teratur akan mampu teratasi dengan sendirinya, karena sistem selalu akan membawa pada keteraturan. Tetapi pada masyarakat yang secara struktural fungsional tidak mampu menjalankan perannya maka akan terjadi gesekan, konflik yang akan berujung pada krisis karakter dalam masyarakat.

C. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Salah satu mata pencaharian manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan berdagang. Pedagang melakukan perdagangan beraneka macam barang. Pedagang melakukan kegiatan perdagangan barang yang didagangkannya dapat berjumlah besar atau kecil, secara grosir maupun eceran. Para pedagang tersebut dapat dikategorikan kepada pedagang besar, kecil dan ada juga istilah pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima atau PKL adalah sebutan untuk pedagang yang berjualan tapi tidak mempunyai kios atau toko.¹⁴ Pedagang kaki lima umumnya berjualan di emperan dan trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak maupun gerobak atau pikulan. Pada umumnya mereka berjualan di tempat yang ramai orang berlalu lalang seperti di area pasar, area wisata, bahkan di area sekolah atau kampus.

Pedagang kaki lima memiliki karakteristik aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel. Selain itu skala usahanya relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil juga. Pada umumnya aktivitas pedagang kaki lima tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah.¹⁵

¹⁴ Gilang Permadi, *Pedagang kaki lima : riwayatmu dulu, nasibmu kini*. (Jakarta: Yudhistira. 2007), 12.

¹⁵ Heri Wahyudianto, *Pedagang kaki lima di kota Jayapura*, (Jakarta : Indocamp. 2018), 12

Secara umum banyak orang memilih untuk menjadi PKL karena banyaknya tenaga kerja namun lapangan kerja sangat terbatas. Beberapa alasan orang memilih berdagang sebagai pedagang kaki lima antara lain¹⁶ :

1. Kesulitan ekonomi.

Kesulitan ekonomi bisa berawal dari adanya krisis ekonomi sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Dari keadaan seperti itulah kemudian memilih menjadi PKL.

2. Sempitnya lapangan pekerjaan.

Dengan banyaknya pengangguran mengakibatkan saling berebutnya pekerjaan yang mengakibatkan lahan pekerjaan semakin sempit. Mereka banyak yang memilih sebagai PKL karena tidak memerlukan banyak modal dan tidak perlu kios atau toko.

3. Urbanisasi.

Perpindahan orang dari desa ke kota dinamakan dengan urbanisasi. Mereka berdatangan dari desa ke kota karena di desa tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Mereka berangkat ke kota tanpa dibekali dengan modal pendidikan dan keahlian. Akhirnya mereka menjadi PKL.

D. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Permasalahannya

Keberadaan PKL menjadi dilemma bagi masyarakat. Manfaat PKL dapat dirasakan masyarakat luas karena menjajakan barang atau makanan

¹⁶ Gilang, *Pedagang kaki lima*, 22.

dengan harga yang relatif murah. Namun disisi lain keberadaan PKL ternyata menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan masalah lingkungan tempat mereka berada. Masalah yang timbul kemudian antara lain kesemrawutan kota, kekotoran, sampah dan sebagainya. Ruang publik yang seharusnya hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik olah raga, jalan kaki, maupaun berkendara menjadi terganggu.

Di berbagai kota, persoalan yang berkaitan dengan kaum pinggiran, khususnya PKL, menjadi sesuatu yang dilematis bagi pemerintah kota. Di satu sisi persoalan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab pemerintah namun disisi lain pemerintah harus menjadikan wajah kota menjadi indah, bersih dan tertata. Dan kebanyakan sikap pemerintah yaitu menjaga agar keteriban dan keindahan kota tetap terjaga. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan penertiban dan penataan terhadap PKL.

E. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Sebagaimana dijelaskan di atas, pedagang kaki lima dipandang sebagai penyebab terjadinya berbagai masalah yang timbul baik masalah sosial maupun masalah ekonomi. Dengan adanya penertiban dan penataan PKL biasanya akan terjadi penolakan yang dilakukan para pedagang. Dengan demikian sering terjadi konflik yang menyebabkan bentrok antara pedagang dan petugas penertiban. Dalam kondisi demikian mendorong munculnya

paguyuban PKL. Beberapa motif tujuan didirikannya Paguyuban PKL antara lain¹⁷ :

1. Motif manajemen.

Dengan adanya paguyuban PKL diharapkan dapat mengatur keberadaan PKL. Keberadaan PKL ketika mereka berdagang di jalan raya maupun sesudah dilakukan relokasi oleh pemerintah. Hal yang diatur antara lain mengenai sistem perdagangan dan struktur ketika berada di sentra PKL.

2. Dapat menyelesaikan konflik.

Konflik pedagang PKL dapat terjadi baik internal pedagang maupun dengan pihak luar pedagang PKL. Berbagai konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan adanya paguyuban PKL tersebut.

3. Gotong royong dalam membangun sentra PKL.

Gotong royong merupakan konsep kebersamaan dalam membangun atau menyelesaikan sesuatu. Gotong royong dilakukan berimbang kepada perkembangan dan kemajuan usaha yang mereka lakukan. Dengan adanya gotong royong dapat meningkatkan penghasilan yang mereka dapatkan.

Paguyuban PKL sebagai sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan usaha mereka untuk memenuhi

¹⁷ Putranto, Dony dan Affandi, M. Arif, "Peran Paguyuban Dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL Taman Prestasi)." *Jurnal Paradigma*, Vol. 1, No. (2013), 5.

kebutuhan hidup sehari-hari. Paguyuban tidak hanya menjalankan fungsinya untuk mewakili kelompok sosial berhadapan dengan aparatur pemerintah namun juga mereka membangun nilai-nilai dan norma-norma yang mereka telah sepakati bersama. Dengan demikian mereka dapat mempertahankan keberadaan mereka dalam menjalani kehidupan.